

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pembebasan Lahan di Bantaran Ciliwung Terhenti Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung karena defisit anggaran. Penataan Sungai Ciliwung pun terus berhenti sejak dua tahun lalu.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Junaini Yusuf mengatakan, akibat efisiensi tahun 2019, anggaran pembebasan lahan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung dikurangi dari Rp 850 miliar menjadi hanya Rp 350 miliar. Pengurangan ini dilakukan di tingkat rapat Tim Anggaran Pemprov DKI sebagai efisiensi untuk mengurangi defisit pendapatan dalam APBD Perubahan DKI 2019.

"Anggaran pembebasan lahan tahun ini sebenarnya Rp 850 miliar, yang sudah terserap Rp 350 miliar. Berarti masih ada Rp 500 miliar lagi, tetapi, kan, distop sekarang," kata Junaini di Gedung DPRD DKI, Senin (11/11/2019).

Menurut dia, sebenarnya dana Rp 500 miliar siap dibayarkan ke pemilik 118 bidang lahan sebab seluruh berkas administrasi sudah selesai diperiksa. Akan tetapi, karena penghentian pembayaran ganti rugi, anggaran pembebasan lahan akan diusulkan dalam APBD 2020.

Pengurangan anggaran dipastikan membuat normalisasi Kali Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) lagi-lagi terhambat. Program ini sudah dua tahun ini tak terlaksana karena

belum ada pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI.

Tahun 2020, anggaran antisipasi banjir di Dinas SDA DKI diusulkan Rp 1 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari anggaran revitalisasi trotoar di Dinas Bina Marga DKI Rp 1,2 triliun.

Dari Rp 1 triliun itu, anggaran pembebasan lahan semula diusulkan Rp 425 miliar. Jumlah ini bahkan tak memadai menutup kekurangan anggaran dari pemotongan anggaran pembebasan lahan tahun ini sebesar Rp 500 miliar. Setelah pembahasan dengan Komisi D DPRD DKI, anggaran pembebasan lahan untuk pelebaran kali dan waduk dinaikkan menjadi Rp 600 miliar.

Sebesar Rp 500 miliar menurut rencana digunakan untuk membayar pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung yang belum terbayar pada 2019. Sisanya akan digunakan untuk pembebasan lahan sungai dan waduk di lokasi lain.

Junaini mengatakan, sebenarnya anggaran tersebut kurang untuk semua program antisipasi banjir Jakarta. Anggaran akan difokuskan untuk operasional, seperti pemeliharaan kali, waduk, dan saluran air; membayar honor 7.000 petugas dalam satuan petugas penanganan banjir; dan operasional pompa air.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, pihaknya sudah memprogramkan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer pada 2020. Program ini merupakan

lanjutan dari program normalisasi sebelumnya. Normalisasi dilakukan di lahan yang berbeda dari 118 lahan yang batal dibayarkan pembebasannya tahun ini oleh Pemprov DKI.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali saat dihubungi secara terpisah menyesalkan pembatalan pembayaran pembebasan lahan itu. "Normalisasi Ciliwung tidak bisa dilanjutkan lagi karena tanggung jawab DKI adalah pembebasan lahan," ujarnya.

Firdaus menambahkan, banjir masih mengancam warga Jakarta yang bermukim di bantaran Ciliwung selama penataan Ciliwung tak kunjung rampung. Padahal, langkah itu bertujuan mengembalikan kapasitas sungai sehingga tidak meluap saat terjadi hujan lebat.

Dari data Kompas, hingga Juli 2019, lahan yang telah dibebaskan Pemprov DKI mencapai 271 bidang atau hanya cukup untuk menormalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 2 km. Secara keseluruhan, panjang Sungai Ciliwung yang perlu dinormalisasi mencapai 19,9 km.

Prioritas anggaran

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menilai postur anggaran 2020 takimbang terkait prioritas penanganan masalah Jakarta. Anggaran antisipasi banjir justru lebih rendah dari anggaran yang diusulkan untuk revitalisasi trotoar. "Padahal, antisipasi banjir ini se-

harusnya menjadi prioritas. Kami menilai revitalisasi trotoar ini targetnya apa," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, program antisipasi banjir tetap berjalan, seperti pengerukan kali dan waduk. "Kalau dikerjakan, sih, semuanya dikerjakan. Tak semua yang kami kerjakan itu terberitakan, tetapi kami siapkan semuanya," katanya.

Besarnya anggaran untuk revitalisasi trotoar, kata Anies, agar penambahan trotoar meningkatkan minat warga berjalan kaki. "Kami bangun jalan untuk pejalan kaki supaya warga lebih banyak berjalan kaki. Dan kami perhatikan semua kota modern dan kosmopolitan seperti Jakarta dengan kegiatan interaksi yang amat intensif selalu punya fasilitas pejalan kaki yang baik. Itu yang kita dorong ke sana," katanya.

(IRE/BOW/VAN)

Program ini sudah dua tahun ini tak terlaksana karena belum ada pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI.